

Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019

Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics

Rubaidi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur, 60237

E-mail: rubaidi@uinsby.ac.id

Dwi Setianingsih

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur, 60237

E-mail: dwisetia@uinsby.ac.id

ABSTRACT

This article examines an important aspect that has not been widely studied in previous writings, namely the dimensions of the contestation of radical Islamic groups and moderate Islamic groups in the 2019 electoral political stage. The representation of radical Islam is represented by the GNPf-MUI which includes Islamic organizations such as FPI, FUI, Larkar Jihad and others. Meanwhile, moderate Islam is represented by Nahdlatul Ulama (NU), some Muhammadiyah and other moderate mass organizations. Behind the frenzy of "Action for Defending Islam" 411, 212, reunion 212, as well as other issues during the 2019 presidential election electoral campaign, there is actually an aspect of the contestation of the two camps in the struggle for Islam in the public sphere and in power politics. Radical Islamic groups carrying the spirit of nativism 'Islamic populism' voiced the agenda of 'political Islam' into the realm of state power through the Prabowo-Sandi camp. Meanwhile, identity political groups are still promoting 'Islam wasyatiyah' with the symbol of the Republic of Indonesia at a fixed price through the Jokowi-Amin camp. This article is based on a qualitative method with a literature study approach from various sources. From the contestation of the two groups, in the end, moderate Islam won, represented by the election of the Jokowi-Makruf Amin pair. Amin, no doubt, does represent the moderate current of Islam where he previously served as Rais Aam of the Nahdlatul Ulama (PBNU) Executive Board. In addition, the pair's victory shows that the dynamics of moderate Islam in Indonesia are still embraced by the majority of Muslims in Indonesia.

Keywords: *Identity politics; Radical Islam; moderate Islam; 2019 presidential election.*

ABSTRAK

Artikel ini menelaah tentang aspek penting yang belum banyak dikaji tulisan-tulisan sebelumnya, yakni dimensi kontestasi kelompok radikal Islam dan kelompok Islam moderat dalam panggung politik elektoral 2019. Representasi dari Islam radikal diwakili GNPF-MUI yang di dalam terdapat ormas Islam seperti FPI, FUI, Larkar Jihad dan sebagainya. Sedangkan, Islam moderat direpresentasi oleh ormas Nahdlatul Ulama (NU), sebagian Muhammadiyah dan ormas moderat lainnya. Di balik hingar-bingar “Aksi Bela Islam” 411, 212, reuni 212, maupun isu lain selama kampanye politik elektoral Pilpres 2019, sesungguhnya terdapat aspek kontestasi dua kubu tersebut dalam perebutan Islam dalam ruang publik maupun politik kekuasaan. Kelompok Islam radikal mengusung semangat nativisme ‘populisme Islam’ menyuarakan agenda ‘Islam politik’ ke dalam ranah kekuasaan negara melalui kubu Prabowo-Sandi. Sedangkan, kelompok politik identitas tengah tetap menggelorakan ‘Islam wasyatiyah’ dengan simbol NKRI harga mati melalui kubu Jokowi-Amin. Artikel ini berbasis metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber. Dari kontestasi kedua kelompok tersebut, pada akhirnya dimenangkan oleh Islam moderat yang direpresentasi melalui terpilihnya pasangan Jokowi-Makruf Amin. Amin, tidak diragukan, memang mewakili arus Islam moderat di mana ia sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selain itu, kemenangan pasangan ini menunjukkan dinamika Islam moderat di Indonesia masih dianut mayoritas muslim di Indonesia.

Kata kunci: Politik identitas; Islam radikal; Islam moderat; pilpres 2019.

PENDAHULUAN

Momentum pilpres 2019 secara akademis memberi banyak data terkait dengan studi dinamika kelompok radikal Islam kontemporer. Kelompok dimaksud dalam kajian ilmu politik identik dengan politik identitas Islam. Dalam konteks Indonesia kontemporer, diskursus tentang politik identitas mengemuka kembali pasca-era reformasi. Wacana politik identitas dipicu, salah satu faktor determinannya adalah momentum selama pilkada Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta 2017. Banyak studi yang telah dicurahkan mengenai politik identitas pada pilkada DKI Jakarta, baik yang menyorot secara khusus tentang politik identitas Islam (Khamdan & Wiharyani, 2018; Romli, 2019; Sawri, 2020) maupun aspek gerakan kebangkitan populisme Islam (Hadiz, 2018; Jati, 2017; Mietzner, 2018). Tidak hanya selama kampanye pilkada DKI Jakarta 2016 saja, politik identitas Islam mendominasi peta perpolitikan saat itu. Politik identitas Islam rupanya tetap dipelihara serta dirawat oleh kelompok maupun kekuatan tertentu. Puncak dari politik identitas Islam menjadi perdebatan di panggung politik nasional menjelang maupun pasca-politik elektoral pilpres 2019. Kebangkitan politik identitas Islam sejak 2016 hingga 2019 menyita perhatian para intelektual, baik Indonesia maupun luar negeri. Selain ditandai sebagai kebangkitan politik identitas Islam sendiri juga dalam perspektif lain disebut sebagai *new Islamic populism* (populisme Islam baru) (Hadiz, 2016).

Kebangkitan politik identitas Islam diawali pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta yang menyisakan dua kontestan, yakni Ahok-Jarot dan Anies-Sandi. Dalam suatu kesempatan kampanye di Kepulauan Seribu, Ahok keseleo lidah dengan menyinggung Surat al-Maidah: 51. Karena penggunaan al-Maidah: 51 itu, Ahok dianggap melakukan tindakan *blasphemy* atau penistaan agama Islam. Sikap protes terhadap Ahok menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran umat Islam beberapa kali yang dikenal dengan “Aksi Bela Islam” jilid I, II, dan III. Aksi bela Islam akhirnya identik dengan aksi 411 dan 212 dengan tujuan menuntut Ahok dipenjara. Aksi Bela Islam yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menandai kebangkitan kembali politik sektarian maupun politik identitas Islam yang sebelumnya memang telah ada dalam sejarah bangsa Indonesia (Sholikin, 2018).

Politik identitas Islam ditandai dengan dominasi secara diskursif wacana Islam di ruang publik, baik melalui berbagai aksi gerakan inkonstitusional maupun politik demokrasi elektoral selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta dan terus berlanjut pada Pilpres 2019. Kata ‘*Ummah*’ sebagai *proxy* dari kata ‘Rakyat’ dalam sistem demokrasi menjadi strategi dalam menyatukan berbagai elemen umat Islam di Indonesia. Perasaan yang sama atas nama ‘*umamah*’ yang merasa diabaikan, dipinggirkan, bahkan didiskriminasi oleh kekuasaan dimobilisasi menjadi suatu kekuatan besar guna menuntut keadilan, persamaan, bahkan representasi kekuasaan. Kata ‘*umamah*’ dapat dipahami sebagai bentuk penegasan terhadap identitas simbolis yang dibingkai melalui ideologi agama Islam. Karena itu,

'*ummah*' dengan sendirinya meneguhkan suatu identitas yang tunggal atau homogen, yakni 'komunitas Islam' atau 'umat Islam.' Di luar '*ummah*' berarti bukan kelompok kita. Karena bukan kita berarti mereka; "*Us versus them.*"

Dalam rentang waktu antara pilkada DKI Jakarta 2017 hingga pilpres 2019, ditandai dengan meningkatnya suhu politik yang beraroma identitas. Melalui "Aksi Bela Islam" 411, 212, reuni 212, maupun selama kampanye pilpres 2019, melahirkan diktum-diktum yang dikotomis yang mengkhawatirkan karena cenderung memecah belah masyarakat luas. Beberapa diktum atau slogan dimaksud antara lain adalah; "Muslim versus Kafir," "Islamis versus nasionalis," "Islam versus sekuler," "Pancasila versus non-Pancasila," "Partai Allah versus Partai setan," dan seterusnya (Akmaliah, 2019). Sebelumnya, pada pilkada DKI Jakarta, kekalahan Ahok, selain karena isu penistaan agama, tidak dapat dilepaskan dari kampanye yang menggunakan sentimen politik identitas Islam itu. Ahok dinarasikan sebagai seorang etnis Cina, Kristen, antek asing (Cina), oligarki Cina, dan sebagainya (Perdana, 2019). Fenomena politik identitas juga digunakan oleh kubu Prabowo yang dimotori eksponen 411 dan 212 dalam memojokkan Jokowi. Jokowi dinarasikan sebagai calon presiden yang "anti Islam," "kriminalisasi ulama," "anak PKI," "antek asing," dan masih banyak lagi.

Konsekuensinya, klaim atas nama '*ummah*' menimbulkan protes oleh sebagian besar komponen umat Islam lainnya. Beberapa komponen umat Islam yang justru memiliki pengikut lebih besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun ormas lain yang bersifat moderat menolak terhadap klaim '*ummah*' tersebut. Di sinilah pokok persoalan yang menarik untuk dikaji. Sejak kelahirannya di Amerika Serikat, diskursus mengenai istilah politik identitas merujuk kepada sekelompok minoritas yang merasa termarginalkan atau terdiskriminasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kuatnya daya resonansi politik identitas Islam yang dirunut sejak 2014 hingga pilkada DKI Jakarta 2016 mengubah peta politik elektoral pilpres 2019. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengakui bahwa salah satu persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah "politik identitas." Terpilihnya Makruf Amin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi tidak terlepas dari gejala menguatnya politik identitas Islam yang dibaca oleh parpol pendukung Jokowi (Sonny, 2019b). Masih ada celah yang kurang mendapat perhatian serius dari para peneliti tentang naiknya Makruf Amin sebagai cawapres. Sesungguhnya, terpilihnya Makruf Amin sebagai cawapres, selain merubah peta politik antara Jokowi versus Prabowo dapat menggambarkan perseteruan antara Islam politik versus Islam kultural atau Islam moderat. Dengan kata lain, naiknya Makruf Amin sebagai cawapres pada pilpres 2019, menunjukkan peta kekuatan sekaligus pertarungan antara kekuatan Islam radikal versus Islam moderat seperti diskripsi di awal. Benarkah demikian? Artikel ini berusaha menyajikan analisis terkait tesis dimaksud.

Tulisan akan mengkaji tentang ‘puncak’ politik identitas Islam yang ingin berebut panggung kekuasaan, baik di tingkat lokal (Jakarta) maupun nasional. Disebut ‘puncak’ berdasarkan asumsi, bahwa, konsolidasi kekuatan politik identitas Islam sesungguhnya telah dilakukan secara *underground* cukup lama, yakni sejak era orde Baru (Orba) dan menjadi kekuatan manifest pasca-reformasi. Momentum pasca-reformasi menjadi media dan ruang ekspresi agenda politik mereka. Realitas ini terbukti pada kemenangan pasangan Anies-Sandi pada pilkada DKI Jakarta 2017. Perebutan ruang kekuasaan pada pilkada DKI Jakarta dilalui melalui penggunaan narasi diskursif Islam dalam perebutan simpati masyarakat muslim Jakarta. Mengacu kepada pilkada DKI Jakarta ini, pola-pola yang sama rupanya terus dipelihara dan digunakan dalam berebut simpati masyarakat muslim Indonesia pada pilpres 2019.

Namun, pilpres 2019 tidak dapat dimenangkan oleh Prabowo-Sandi yang didukung oleh Islam politik atau Islam radikal. Karena itu, pilpres 2019 dalam konteks politik identitas menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Satu hal yang belum banyak dikaji tulisan-tulisan sebelumnya adalah fakta tentang kontestasi di internal umat Islam Indonesia adalah perebutan ruang publik kekuasaan di antara kekuatan politik identitas Islam, yakni kekuatan Islam politik atau Islam radikal versus Islam moderat. Para sarjana lebih melihat fenomena pilpres sebagai fenomena populisme Islam seperti ditunjukkan Hadiz (2018), Mietzner (2018), dan sebagainya. Fakta ini bukan hanya berhenti pada perebutan wacana maupun politik praktis belaka. Secara empiris, polarisasi Islam moderat versus Islam radikal memang sejak lama ditemukan dalam kilasan sejarah masyarakat Islam, terutama di lokus utamanya, yakni di Timur Tengah. Tidak banyak yang mengungkap secara mendalam mengenai kemenangan Jokowi-Amin, terutama kontribusi kelompok Islam yang direpresentasi melalui ormas seperti NU atau ormas moderat lainnya. Tanpa menafikan kontribusi kelompok nasionalis yang menyumbang suara untuk Jokowi-Amin, suara yang disumbang warga NU sebagai representasi Islam moderat sangat signifikan bagi kemenangan Jokowi-Amin.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif diskriptif. Pendekatan yang digunakan berbasis kepada analisis data yang bersumber dari berbagai referensi yang terkait dengan tema dimaksud. Referensi ini meliputi artikel jurnal, berita internet terverifikasi, buku, majalah, maupun sumber lain yang terpercaya. Dari berbagai sumber data tersebut dianalisis berdasarkan teknik triangulasi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan kaidah ilmiah untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diuji secara ilmiah pula. Sebagaimana dalam penelitian sosial-humaniora, subjektivitas peneliti akan diuji tingkat objektivitasnya melalui standar ilmiah yang berlaku dalam dunia keilmuan. Di sini, akan dapat menguji tentang fenomena politik identitas Islam di Indonesia yang menjadi bagian dari fenomena politik identitas secara global berbasis agama yang terjadi di hampir semua negara, termasuk negara maju seperti Eropa maupun

Amerika Serikat. Di Kawasan ini, politik identitas atau dikenal dengan populisme kanan menjadi fenomena kontemporer di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas dan Politik Identitas Islam

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik di atas, ada baiknya menelaah kembali makna dasar tentang politik identitas. Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Umar & Kahar, 2019). Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan (Nasrudin, 2018).

Gerakan ini lahir karena kegagalan atas narasi besar seperti ide-ide kebebasan dan toleransi yang dibangun oleh pemerintah. Karena itu, politik perbedaan menjadi nama baru dari politik identitas seperti; rasisme, feminisme, dan konflik etnik (Romli, 2019). Sampai di sini dapat dipahami, bahwa, politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar aspek primordialisme. Dalam konteks Indonesia nantinya, secara etnis, politik identitas tercermin mulanya dari upaya memasukan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendapatkan 'prevelege' berupa otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Di sisi lain, dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk lahirnya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (baca: Islam) (Nasrudin, 2018). Dalam skala besar, gerakan politik identitas dapat menuntut negara atas dasar agama tertentu (baca: Negara Islam, khilafah Islamiyah, atau minimal syariat Islam).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil benang merah bahwa politik identitas menunjukkan adanya dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama dipakai dan berpengaruh dalam proses kebijakan politik. Dua faktor dimaksud adalah; *Pertama*, momentum di mana etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Di sini, etnis maupun agama ditempatkan untuk

mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. *Kedua*, suatu proses politik yang berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan pilpres 2019 menggambarkan proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Dalam konteks itu, para aktor yang terlibat politik mengelola isu-isu seperti etnis dan agama menjadi media dalam meraih simpati masyarakat (Nasrudin, 2018). Baik pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Pilpres 2019 memiliki kaitan. Karena para aktor yang berperan adalah sama. Hal ini tercermin dari figur Riziq Shibab misalnya. Selain itu, elemen organisasi di dua momentum itu juga sama, yakni FPI, FUI, MUI, dan seterusnya.

Studi tentang politik identitas di kalangan para sarjana sesungguhnya mulai mendapat tempat dan perhatian serius sekitar 1970-an. Konteks kajian politik identitas sendiri dalam tradisi akademis di Amerika Serikat saat menghadapi masalah-masalah seperti minoritas, gender, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, teraliansasi, termarginalisasi, bahkan terdiskriminasi. Dalam perkembangan selanjutnya, dari persoalan-persoalan di atas mengembang ke masalah agama, kepercayaan, serta ikatan-ikatan kultural yang beragam (Maarif, 2012). Isu-isu tersebut juga dirasakan tidak hanya di Amerika Serikat saja, tetapi juga dialami oleh berbagai negara di belahan dunia lainnya, khususnya negara-negara yang memiliki heterogenitas masyarakat seperti Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan politik identitas di era post-Suharto lebih terkait dengan isu atau tema mengenai; agama, etnisitas, suku, ideologi, serta berbagai kepentingan lokal yang diwakili serta disuarakan oleh elit dengan artikulasi kepentingan masing-masing. Politik identitas dalam banyak kasus akan muncul dalam suatu kondisi di mana kelompok atas nama tersebut di atas mengalami diskriminasi, peminggiran, maupun ketidakadilan lain baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Realitas tersebut dalam alam bawah sadar akan membentuk perasaan kolektif untuk melakukan ekspresi dalam rangka menuntut keadilan, kesetaraan, dan derajat yang sama dengan kelompok mayoritas lainnya.

Dalam sejarah politik identitas di Amerika Serikat, Kauffman banyak memberi data, pengalaman, sekaligus *lesson learned*. Dia memulai studi-studi tentang politik identitas dengan mengkaji fenomena gerakan mahasiswa kulit hitam yang melakukan kampanye anti kekerasan yang dikenal dengan *The Student non-violent Coordinating Committee* (SNCC). SNCC adalah suatu organisasi yang bergerak pada isu yang menuntut hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an. Secara substantif, SNCC ini mengusung politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di Amerika

Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik diskriminasi telah membangun kesadaran kelompok yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme secara nyata lebih berpihak kepada para pemilik modal yang umumnya dikuasai oleh golongan kulit putih (Kauffman, 2001).

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, salah satu bentuk ekstrem politik identitas adalah mencuatnya sampai batas-batas tertentu gagasan tentang separatisme. Fenomena ini misalnya terlihat di Quebec. Masyarakat Quebec adalah entitas masyarakat yang berbahasa dan berbudaya Perancis. Karena secara kultur dan bahasa menggunakan identitas Perancis, mereka ingin memisahkan diri dari bangsa Kanada yang berbahasa Inggris. Fenomena yang sama dapat dilihat dalam kasus gerakan Islam tipikal Louis Farrakhan yang mengusung semangat *The Nation of Islam* di Amerika Serikat. Gerakan ini ditolak oleh kelompok masyarakat kulit hitam muslim arus besar lainnya, bahkan sempat menimbulkan ketegangan di antara masyarakat kulit hitam sendiri. Untungnya, pada tahun 2000 polemik tentang politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian serta kompromi antara Farrakhan dengan Wareeth Din Muhammad, mantan saingannya, untuk meredam politik identitas kelompok muslim kulit hitam untuk kemudian menyatukan dirinya dengan arus besar bangsa Amerika Serikat yang terkenal dengan simbol pluralitasnya.

Pada 1990-an, Gufmann meneliti lagi tentang bangkitnya beberapa gerakan politik identitas berbasis etnik maupun agama di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, maupun Israel. Pada 1990-an, di Amerika Serikat, isu tentang feminisme, rasialisme kulit hitam (yang asosiasikan dengan Islam), LGBT, mulai disuarakan dalam rangka menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Pada tahun 1990-an yang sama, di Kanada, terdapat sebuah sekte keagamaan kelompok *Sikhs* melakukan protes keras karena larangan pemerintah atas pemakaian jubah hitam besar khas kelompok mereka. Masih pada tahun 1990-an, Gufmann juga mencatat protes kelompok perempuan Yahudi yang dikenal dengan "*women off the wall*." Aksi protes kelompok perempuan Yahudi ini ditujukan kepada pengadilan tinggi Israel yang menuntut persamaan hak dalam ibadah di tembok ratapan di Palestina sebagaimana kaum laki-laki (Vega, 2005).

Bagaimana dengan dinamika Indonesia? Seperti disinggung bagian atas, politik identitas di Indonesia lebih bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Sejak merdeka, Indonesia berjibaku dalam menangani beberapa gerakan terkait politik identitas berbasis etnis dan ideologi politik. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama bertahun-tahun menjadi isu internasional. Pimpinan GAM, bahkan berpusat di Helsinki, Swedia dalam diplomasi internasional di PBB. Selain GAM, Indonesia juga direpotkan dengan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang berpusat di Belanda. Satu lagi yang tidak kalah menyita perhatian adalah Gerakan Papua

Merdeka (GPM) (Romli, 2019). Khusus GPM, gerakan ini masih berjalan dan indikasinya diintervensi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia.

Sementara itu, dalam konteks politik identitas agama (Islam), Indonesia memiliki sejarah panjang. Bibit politik identitas Islam telah ada sejak Indonesia merdeka. Bahkan, politik identitas Islam menegaskan dirinya pada saat negara ini akan dilahirkan. Dalam rangkaian rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi polemik tajam tentang sila pertama dalam Pancasila. Kelompok politik identitas Islam mengusulkan tujuh kata, yakni “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tujuh kata ini disetujui dalam rapat BPUPKI, 22 Juni 1945 yang dikenal dengan “Piagam Jakarta.” Usulan ini secara substansi mengingankan Indonesia sebagai negara Islam. Dalam rangkaian rapat BPUPKI dan PPKI, wacana tentang negara Islam memang kuat. Namun, hasil rapat PPKI, melalui perdebatan alot, akhirnya Piagam Jakarta dihilangkan dalam Sila Pertama Pancasila (Nurhadi, 2019).

Sebagai bentuk sikap atas eskresi dan penegasian Piagam Jakarta dalam dasar negara melahirkan penolakan, bahkan pemberontakan kelompok politik identitas Islam terhadap negara yang baru saja lahir. Pada 1948, di Jawa Barat, Kartosuwiryo mendeklarasikan diri sebagai imam dari negara Islam atau *Darul Islam* dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) (Wahid, 2019). Pada 1952-1953, Kahar Muzakkar, salah seorang tokoh selama perang revolusi kecewa atas ditolaknya menjadi Komandan dalam brigade ketentaraan (TNI) oleh Kawilarang. Muzakkar akhirnya masuk hutan dengan pasukan yang telah dibina selama perang revolusi. Di dalam hutan, dia melakukan korespondensi dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Dalam korespondensi, Muzakkar dijanjikan Kartosuwiryo menjadi Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia (TII) jika dia bergabung dengan DI. Pada 7 Agustus 1955, Muzakkar memproklamakan diri, bahwa, wilayah Sulawesi menjadi bagian dari Negara Republik Islam Indonesia atau *Darul Islam*. Dalam rangka mencari dukungan terhadap DI/TII, kelompok Muzakkar tidak segan melakukan aksi teror kepada masyarakat (Khair, 2020).

Semangat politik identitas Islam tidak surut paska gerakan DI/TII, baik di Jawa Barat maupun Sulawesi Selatan. Spirit negara Islam atau setidaknya “Piagam Madinah” terus hidup dalam dinamika politik Indonesia modern. Melalui politik elektoral 1955, dalam berbagai sidang konstituante, wacana tentang negara Islam tidak pernah pudar. Awalnya, Masyumi, NU, dan PSII bersatu menyuarakan spirit “Piagam Jakarta.” Namun, suara Partai Islam gabungan Masyumi, NU, dan PSII hanya sebesar 44% tidak dapat mengalahkan gabungan ‘Partai Nasionalis’ sebesar 65%. Karena sidang konstituante *deadlock*, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 dan ditandai dengan berlakunya demokrasi terpimpin. Selama demokrasi terpimpin, tinggal Masyumi yang direpresentasi oleh M. Natsir tetap lantang menyuarakan negara Islam. Akibatnya, pada 13 September 1960, Presiden

Sukarno secara resmi membubarkan Masyumi melalui Surat Keputusan Presiden No. 200/1960 (Nurhadi, 2019).

Berakhirnya pemberontakan berbasis politik identitas Islam DI/TII Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar serta dibubarkannya Masyumi tidak serta merta menandai berakhirnya politik identitas Islam di Indonesia. Di bawah rezim Orde Baru (Orba) pimpinan Suharto, politik identitas Islam bergerak membentuk sel-sel baru. Melalui tokohnya, M. Natsir, Masyumi bermetamorfosis menjadi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (Assyaukani, 2009). Natsir dengan jaringan *Rabithah Alam Islami* berpusat di Makkah, berhasil memfasilitasi atas berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). LIPIA di kemudian hari menjadi corong ideologi Wahabisme maupun *Salafi*. Beberapa tokoh seperti Ja'far Umar Thalib, Anis Matta (PKS) dan masih lagi dididik di LIPIA. Ja'far Umar Thalib dan berteman dengan Abu Bakar Ba'asyir mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Sementara itu, Jakfar Umar Thalib sendirikan mendirikan Laskar Jihad (Rahmat, 2005). Beberapa tokoh DDII membentuk organ-organ baru seperti Ormas Tarbiyah. Tarbiyah tidak lain adalah Ormas yang membidani lahirnya Partai Keadilan (PK) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara ideologi dipengaruhi Ihwan al-Muslimin di Mesir (Mudzakkir, 2016).

Era post-Suharto menjadi ruang ekspresi bagi berbagai kelompok politik identitas Islam dengan orientasi lama, yakni semangat mengusung negara Islam maupun 'Piagam Jakarta' atau syariat Islam. Pada Pemilu 1999, Ormas Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK). Pada Pemilu 1999 pula, PK tidak lolos *electoral threshold*, akhirnya berubah menjadi PKS pada Pemilu 2004 (Bubalo & Fealy, 2005). Selain bertujuan mendirikan negara Islam dan penegakan syariat Islam, terdapat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bercita-cita mendirikan *khilafah Islamiyah*. HTI yang masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman al-Bagdadi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1983, mulai mendeklarasikan diri menyuarakan *khilafah Islamiyah* pada 2000 dengan mengumpulkan sekitar 5000 kader di Istora, Jakarta. Bahkan, pada Sidang MPR-RI 2002, sekitar 20.000 kader, HTI secara terang-terangan mengusulkan syariat Islam dan *khilafah Islamiyah* (Rizqa & Ramadhan, 2017).

Era post-Suharto atau era reformasi, selain kelompok Islam radikal tersebut, masih banyak lagi berdiri Ormas Islam radikal yang mengusung semangat politik identitas Islam. Selain Laskar Jihad dan MMI, terdapat beberapa Ormas Radikal lain, seperti Forum Komunikasi Ahlusunah wa al-Jamaah (FKAJ) yang juga didirikan oleh Jakfar Umar Thalib, Anshor al-Tauhid, Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan sebagainya. Beberapa Ormas Radikal tersebut pada induknya disebut sebagai kelompok *salafi*. *Salafi* sendiri lahir dari rahim ideologi wahabiyah yang terus melakukan metamorphosis dalam berbagai bentuk Ormas dari agak moderat hingga keras, bahkan teroris seperti kelompok Jama'ah Islamiyah (JI) yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir (ICG, 2020). Seluruh

Ormas Islam radikal ini, menurut Maarif, disebut dengan gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju (politik identitas) Islam (Maarif, 2012).

Meskipun antara satu kelompok dengan lainnya berbeda, tetapi, mereka dipertemukan pada beberapa persamaan; (1) Negara Islam, (2) Khilafah Islam, (3) Syariat Islam, dan (4) Anti demokrasi. Sebagai perkecualian di antara ormas radikal tersebut hanya PKS terkait point 4. PKS menempuh dan menerima jalan demokrasi untuk meraih tujuannya. Dalam dokumen resmi partai disebutkan, bahwa PKS tidak menolak demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia. Bahkan, menurut dokumen itu, dengan berpedoman kepada Piagam Madinah, PKS menerima kenyataan pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia (PKS, 2008). Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah penerimaan ini sebagai siasat politik sementara atau memang PKS telah menyesuaikan perjuangannya dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia? Jawabannya tidak mungkin diberikan sekarang; kita masih harus menunggu sampai suatu ketika sekiranya PKS pegang kekuasaan dan telah membesar. Bila partai ini konsisten dengan apa yang dikatakan dalam dokumen resminya, maka corak Islamis yang menjadi ciri utama gerakan Ikhwan di negara-negara Arab dan di negara-negara lain telah mengalami perubahan orientasi mendasar di tangan PKS (Maarif, 2012).

Pilpres 2019: Politik Identitas Islam Kanan Versus Politik Identitas Islam Tengah

Pilihan Makruf Amin sebagai pasangan Jokowi bukan terjadi secara tiba-tiba. Sebelum Jokowi memutuskan memilih Amin sebagai pendampingnya, terdapat nama yang cukup santer, yakni Mahfud MD. Batalnya Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan terpilihnya Makruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi menunjukkan realitas politik Indonesia kontemporer ditandai dengan menguatnya politik identitas (Anam, 2019). Politik identitas dimaksud lebih ditujukan kepada entitas umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Karena itu, pandangan pilpres 2019 dapat dibaca sebagai perebutan kantong-kantong suara umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena pilpres 2019 sekaligus membedakan dengan politik elektoral sebelumnya yang tidak begitu menempatkan isu politik identitas sebagai sentral strategi maupun tema kampanye antarcalon presiden. Walaupun bibit politik identitas telah muncul pada pilpres 2014 dengan kontestan capres yang sama (Jokowi versus Prabowo), namun isu politik identitas, khususnya Islam tidak begitu dominan.

Pertimbangan dipilihnya Makruf Amin sebagai justifikasi dan response atas kebangkitan kekuatan politik identitas Islam yang dirasakan oleh Parpol pengusung Jokowi. Tidak dipilihnya Mahfud MD, salah satu alasannya karena kekawatiran Parpol pengusung terhadap potensi Mahfud MD menjadi *'the raising star'* pada Pilpres 2024 (Sonny, 2019b). Bagi Jokowi, figur Mahfud yang bukan ulama dianggap belum bisa membentengi dirinya dari serangan kelompok populisme Islam. Meskipun memiliki latar belakang NU, namun sosok Mahfud MD dianggap

kurang memiliki identitas Islam secara kuat. Di luar dua analisa tersebut, terdapat opini lain, bahwa, PBNU melalui Said Agil Siraj, sempat mengancam, jika Cawapres bukan berasal dari kader NU, maka, NU tidak akan bertanggungjawab secara moral terhadap pemerintahan yang sah. Statmen tersebut secara tidak langsung sebagai bentuk penolakan terhadap sosok Mahfud MD (Iqbal, 2019).

Sebaliknya, figure Makruf Amin dalam konteks politik identitas Islam dianggap ideal. Makruf Amin sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam. Saat terpilih, ia memiliki modal sosial maupun kultural. Salah satu pertimbangan utama, ia masih menjadi orang nomor satu di NU, yakni sebagai *Rais Am* PBNU. Selain itu, ia juga masih aktif menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Selama di MUI, ia banyak bersinggungan dengan tokoh-tokoh Islam radikal. Sebaliknya, di kalangan tokoh Islam radikal yang direpresentasikan melalui GNPf-MUI diterima dengan baik. Secara karir politik, ia memiliki pengalaman menjadi anggota legislatif dari PKB, bahkan pernah menjabat sebagai ketua dewan syuro PKB era Gus Dur. Ia juga pernah menjabat Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) (Sonny, 2019a). Walau di sisi lain, posisi Makruf Amin di MUI justru menjadi titik lemah. Makruf dalam kaitan “Aksi Bela Islam” menuntut Ahok diadili, ia menjadi bagian dari arsitek di dalamnya. Karenanya, naiknya sebagai Cawapres menimbulkan resistensi di kalangan *Ahoker* dan sebagian kelompok lainnya. Sebaliknya, jabatan sebagai ketua MUI, ternyata tidak mampu “menjinakkan” barisan GNPf dalam Pilpres 2019. Buktinya, barisan GNPf-MUI tetap menjadi mesin politik Prabowo-Sandi.

Bagi Jokowi sendiri, pilihan pada Makruf Amin memiliki makna signifikan dan strategis. Berkaca pada Pilpres 2014, Jokowi didiskritkan dengan isu-isu negatif berbasis politik identitas seperti ‘anak PKI’ atau ‘keturunan PKI’ (Margiansyah, 2019). Isu-isu demikian tetap diproduksi menjelang Pilpres 2019 untuk mencitrakan Jokowi benar-benar memiliki hubungan sejarah dengan PKI. Bahkan, dalam rentetan “Aksi Bela Islam” 411 maupun 212, Jokowi diserang dengan isu-isu politik identitas. Slogan seperti “Anti Islam,” “PKriminalisasi Ulama,” #Ganti presiden, dan sebagainya dialamatkan secara khusus kepada Jokowi. Walaupun tidak terkait secara langsung, pembubaran HTI era pemerintahan Jokowi pada 2017, seakan semakin menjustifikasi dan membenarkan atas tuduhan terhadap Jokowi yang anti Islam. Dengan dipilihnya Makruf Amin sebagai Cawapres diharapkan mampu meredam dan menghilangkan *image* negatif yang lekat pada Jokowi (Akmaliah, 2019).

Namun demikian, dalam perspektif politik identitas, pilihan pada Makruf Amin sebagai Cawapres dapat dipandang sebagai pertarungan politik yang sifatnya gambling. Makruf secara jelas mewakili NU atau Islam moderat. Secara langsung maupun tidak langsung, kontestasi Pilpres 2019 menjadi panggung ‘adu kekuatan’ antara politik identitas Islam radikal versus politik identitas Islam moderat. Istilah populisme kanan, kiri, maupun tengah telah lama muncul dalam tradisi populisme

di Eropa dan Amerika Serikat, maupun Amerika Latin. Tidak salah apabila Pilpres 2019, dapat dikatakan sebagai kontestasi antara politik identitas kanan versus politik identitas tengah. Istilah ‘kanan’ identik dengan ideologi Kristen dan ultra-nasionalis di Eropa maupun Amerika Serikat. Sementara, istilah ‘tengah’ merujuk kepada kelompok nasionalis (Mudde, 2004). Namun, baik istilah ‘kanan’ maupun ‘tengah’ di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang secara umum dapat dipolakan ke dalam dua arus besar, yakni kelompok Islam radikal dan Islam moderat. Dua arus utama, sejak lama telah digunakan oleh para sarjana barat dalam memotret Islam di Indonesia (Liddle, 1993).

Kontestasi antara Islam kanan versus Islam moderat pada ranah praksis kehidupan sehari-hari lalu dibawa ke dalam ranah politik kekuasaan. Sejak reformasi, riak-riak kecil konflik kedua kelompok sering kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jauh sebelum Pilpres 2019, pengajian Ustadz Abdussomad (UAS) di beberapa daerah Jawa Timur “dicekal” oleh komponen masyarakat NU. Di beberapa titik daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terjadi perselisihan, bahkan bentrok fisik antara FPI dengan Ansor maupun Banser. Belum lagi kehadiran beberapa Ustadz dari kelompok *salafi* juga ditolak diberbagai tempat oleh komponen warga NU karena dianggap meresahkan masyarakat dengan materi ceramah yang selalu mengusung tema *bid’ah*, *syirik*, *kafir*, atau sejenisnya terhadap sesama umat Islam, lebih-lebih amaliyah ubudiyah NU. Perselisihan yang awalnya pada ranah kultural digeser ke ranah politik kekuasaan. Dengan kata lain, dalam alam bawah sadar kedua kelompok, konflik yang awalnya terjadi pada aras local lalu menjadi pertarungan nasional yang dipicu dalam serangkaian kampanye selama Pilpres 2019.

Makruf Amin mulai tour kampanye dengan mengusung tema seputar moderasi Islam saat definitif menjadi Cawapres Jokowi. Gagasan strategis Ma’ruf Amin selama kampanye lebih menekankan pada tema “*Islam Washatiyah*,” “*Islam jalan tengah*” atau “*Moderasi Islam*.” Tema ini memang sedang dibutuhkan bukan hanya di Indonesia, melainkan kebutuhan dunia internasional. *Islam Washatiyah* menjadi isu besar guna menjawab maraknya aksi terorisme dan perang yang mangatasnamakan agama yang menjadi masalah internasional (Sonny, 2019a). Menurut Razali Kassim, peneliti pada Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSiS), kampanye Makruf Amin yang mengusung tema *Islam Washatiyah* mampu menjadi penarik suara potensial (Kassim, 2020). Tema yang diusung Makruf Amin tentu saja menjadi *common plat form* sekaligus ciri khas ideologi NU. Singkatnya, Makruf Amin meneguhkan diri sebagai bagian dari NU.

Berbeda dengan Makruf, kelompok populisme Islam selama kampanye Pilpres 2019 lebih menekankan arti penting Islam dalam ruang public maupun negara. Mereka meneriakkan Islam sebagai identitas pribadi di ruang public, baik dalam kehidupan keluarga maupun di ranah negeri. Menurut Hadiz, kelompok Islam kanan dalam menyuarakan kepentingan politiknya mengatasnamakan umat

atau ‘*ummah*.’ Kata ‘*ummah*’ dimaksudkan sebagai sebuah *proxy* kata yang disamakan dengan ‘rakyat’ (Hadiz, 2016). Penggunaan *proxy* ‘*ummah*’ sesungguhnya bukan tanpa alasan. Kata ‘*ummah*’ memiliki makna luas. ‘*Ummah*’ merupakan unit terluas dalam konsepsi politik Islam dalam negara Islam. Karena itu, penggunaan *proxy* kata ‘*ummah*’ sesungguhnya sama dengan mengukung konsep negara Islam. Sebab, antara negara Islam dengan ‘*ummah*’ merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Penggunaan *proxy* kata ‘*ummah*’ dalam berbagai gerakan Islam kanan dapat dilihat sejak “Aksi Bela Islam” 411 dan 212 pada 2016 dalam rangkaian Pilkada DKI Jakarta. “Aksi Bela Islam” 411, 212, bahkan reuni 212 terus direproduksi oleh kelompok Islam kanan dalam kampanye Pilpres 2019.

Diskursus “Aksi Bela Islam” di atas semakin menguatkan asumsi terhadap politik identitas Islam. Hadiz menyebutnya sebagai kebangkitan *new-Islamic populism* (populisme Islam baru) (Hadiz, 2016). Bahkan, Mietzner lebih vulgar lagi menyebutnya sebagai *Islamist populism* (populisme Islamis) (Mietzner, 2018). “Aksi Bela Islam” menjadi symbol dari berbagai kelompok Islam kanan sebagai barisan pendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Kelompok Islam kanan direpresentasikan oleh GNPf-MUI yang diwakili oleh FPI, MMI, PKS, HMI, Larkar Jihad, FUI, HTI, dan beberapa Ormas Islam radikal lainnya melebur menjadi satu. MUI sebagai wadah Ormas Islam di Indonesia diinfiltrasi oleh tokoh-tokoh Islam kanan. Tokoh-tokoh yang memengaruhi karakter kerasnya MUI seperti KH. A. Cholil Ridwan, aktivis Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan alumni Universitas Islam Madinah yang pernah membuat kontroversi tentang hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan hukumnya haram. Adian Husaini, sekretaris jenderal Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan sejumlah tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Umat Islam (FUI) seperti Muhammad al-Khatthath juga pernah menduduki posisi pengurus MUI Pusat. Pada kepengurusan MUI 2015-2020, masuk tokoh-tokoh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang sangat anti-liberalisme dan sangat puritan. Di antara tokoh ini adalah Bachtiar Nasir, Adnin Armas, Zaitun Rasmin, dan Fahmi Salim. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kontestasi di internal MUI dalam perebutan otoritas keagamaan (Khamdan & Wiharyani, 2018).

Fenomena kebangkitan politik identitas atau populisme Islam di Indonesia mengadopsi populisme di Eropa, Amerika Serikat, maupun Amerika Latin. Di Eropa, jalan mulus parlemen Inggris memenangkan voting untuk keluar dari Uni Eropa atau dikenal dengan Brexit, karena dukungan partai Perdana Menteri Inggris dan kelompok konservatif kristen yang berhaluan kanan. Begitu juga dengan kemenangan Donald Trump, 2016, menjadi presiden Amerika Serikat karena penggunaan politik identitas kanan yang direpresentasikan oleh mayoritas warga Kristen *anglo-saxon protestan* (Mudde & Kaltwasser, 2013). Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya dalam rentang 1999-2010, gerakan populisme di Amerika Latin setidaknya direpresentasi melalui kemenangan politik electoral Hugo Chavez dengan *United Socialist Partay* (PSU) di Venezuela dan Evo Morales bersama *Movement for Socialism* (MAS) di Bolivia mampu mengantarkan keduanya

menduduki kursi presiden (Inglehart & Norris, 2016). Di Indonesia sendiri, seperti fenomena politik identitas di kawasan Eropa, Amerika Serikat, maupun Amerika Latin, juga memiliki akar kesejarahan politik identitas kanan, tengah, maupun kiri. Namun, politik identitas dalam konteks tulisan ini lebih dimaksudkan sebagai politik identitas Islam, baik berhaluan kanan maupun tengah.

Fenomena populisme barat maupun populisme Islam di Indonesia memiliki kesamaan dasar, yakni mobilisasi politik identitas. Dalam rentang 2016-2019 melalui pilkada DKI Jakarta maupun pilpres 2019, politik identitas menjadi wacana dominan yang ditunjukkan melalui strategi kampanye. Terdapat dua dimensi yang dieksploitasi dalam politik identitas Islam di Indonesia selama pilpres 2019, seperti halnya populisme di Barat adalah isu tentang (1) anti-kemapanan dan (2) *nativisme* (Inglehart & Norris, 2016). Pada isu pertama dapat dilihat pada kritik selama kampanye, baik yang ditunjukkan oleh Prabowo maupun para pendukung sayap Islam kanan terhadap kubu petahana. Kelompok Islam kanan mengkonstruksi narasi akan ketertindasan “*ummah*’ oleh kekuasaan. Sementara itu, isu *nativisme* yang dimaksudkan dalam populisme barat yang berasumsi, bahwa, masyarakat dalam suatu negara pada dasarnya sifatnya *homogen* atau *uniform*. Konsekuensinya, negara hendaknya menegaskan atau mengeluarkan kelompok lain yang berbeda secara etnis maupun kultur budaya. Dalam konteks Amerika Serikat, kaum Hispanik dan imigran yang sebagian besarnya kaum kulit hitam yang diasosiasikan dengan Islam bukan bagian dari nativis (Inglehart & Norris, 2016). Dalam konteks pilkada DKI Jakarta, Ahok harus ditolak sebagai pemimpin karena ia bukan orang Islam (Kristen), Cina, serta representasi dari oligarki maupun asing, khususnya kepentingan Cina. Sementara, pada pilpres 2019, Jokowi dinarasikan sebagai figur, alih-alih seorang muslim yang taat, bahkan tidak mengakomodasi kepentingan ‘*ummah*.’ Penggunaan sentimen *nativis* lain dapat dilacak dalam perang di media sosial, misalnya “Islam versus sekuler,” “Pancasila versus syariat Islam,” “Islam versus nasionalis,” ataupun “partai Allah versus partai setan” seperti pernyataan Amin Rais.

Kontestasi politik identitas antara kekuatan Islam kanan dan Islam moderat secara simbolis, puncaknya ditandai dengan politisasi Islam dalam mengabsahkan figur calon presiden dan wakil presiden masing-masing. Kelompok GNPf-MUI mengadakan ijtima’ ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima’ merekomendasikan Prabowo. Sebagai pendampingnya, disepakati dua tokoh, yakni Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri dan Ustad Abdul Somad (Zuhro, 2019). Hasil ijtima’ ulama tersebut justru mendapat sanggahan dari kelompok Islam moderat karena dinilai tidak mewakili ulama-ulama lainnya. Sebagai anti tesis atas Ijtima’ Ulama ini, sekitar 400 kiai NU dari pesantren seluruh Indonesia mengadakan *multaqa ulama* yang diselenggarakan di Pondok Pesantren As-Syiddiqiyah pimpinan KH. Nur Iskandar di Jakarta. Hasil dari *multaqa ulama* menyatakan dukungan atas pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin (*Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019*, 2020).

Seberapa besar kontribusi suara Islam moderat, terutama direpresentasi oleh warga NU pada pilpres 2019 memang menjadi perdebatan. Berbasis pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemenangan pasangan Jokowi-Amin, ditentukan oleh beberapa provinsi yang menjadi kantong basis warga NU. Beberapa basis kantong NU dimaksud meliputi; (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3) Lampung, (4) beberapa propinsi Kalimantan (*Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019*, 2020). Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis utama warga NU menyumbang suara sangat besar bagi kemenangan pasangan Jokowi-Amin. Sesuai rekapitulasi KPU, komposisi perolehan suara di Jawa Tengah, pasangan Jokowi-Amin: 16.784.716 suara berbanding Prabowo-Sandi: 4.939.445. Sementara, di Jawa Timur, perbandingan suara keduanya adalah: 16.189.282 berbanding 8.419.928. Dari dua provinsi ini, pasangan Jokowi-Amin memenangi suara terhadap Prabowo-Sandi sebesar 19.614.625 suara. Sementara, basis dukungan Prabowo-Sandi menang besar, terutama di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan Banten. Jawa Barat secara historis menjadi basis kelompok Islam kanan seperti DI/TII dan kelompok modernis. Sedangkan, Sumatera Barat dan Aceh dikenal sebagai basis kelompok modernis. Selebihnya, dari sebaran perolehan suara, kemenangan Jokowi-Amin didukung oleh kelompok nasionalis dan non-muslim yang dalam sudut pandang kebangsaan memiliki kesamaan dengan NU.

Kontribusi politik identitas moderat melalui suara warga NU dalam pilpres 2019 bagi kemenangan Jokowi-Amin bukan secara kebetulan maupun justifikasi saja. Berbeda dengan pilpres sebelumnya, dalam lima tahun terakhir, secara kelembagaan dan organisasi, NU telah melakukan penguatan *capacity building*. Kebangkitan populisme Islam maupun politik identitas Islam kanan dijawab dengan proses-proses konsolidasi maupun kaderisasi internal di organisasi NU. Bentuk konsolidasi maupun kaderisasi internal NU di antaranya adalah Madrasah Kader Nahdlatul Ulama PBNU, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK), Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU), Muharrrik Masjid dan Dakwah, dan Pendidikan Kader Dai. dan FGD Kyai Muda (Setiyawan & Dahani, 2020). Proses konsolidasi dan kaderisasi internal NU memberi dampak secara langsung pada momen pilpres 2019. Pilpres 2019 yang mengusung semangat politik identitas Islam kanan harus berhadap-hadapan dengan populisme Islam tengah ini.

Pada akhirnya, kontestasi perebutan kekuasaan, baik di ruang publik maupun ranah politik kekuasaan, antara politik identitas Islam kanan dan politik identitas Islam tengah dimenangkan oleh Islam tengah. KPU sebagai ‘juri’ yang mengadili menetapkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019. Pengalaman politik identitas Islam di Indonesia memang tidak seperti kemenangan Brexit di Inggris maupun Trump di Amerika Serikat. Banyak ditemukan gerakan politik identitas maupun populisme di beberapa negara di Eropa yang seolah-olah telah menguasai ruang publik, terutama di media sosial, tidak berakhir dengan kemenangan. Beberapa contoh demikian dijumpai pada Marine Le

Pen di Perancis, Geert Wilders di Belanda, dan masih banyak lainnya (Inglehart & Norris, 2016).

KESIMPULAN

Kontestasi antara Islam radikal dan Islam moderat, dalam sejarah Islam di Indonesia telah terjadi sejak lama dan sifatnya dinamis. Dalam sejarahnya, perseteruan antara keduanya tidak hanya terjadi dalam ruang publik saja, tetapi juga dalam ranah kekuasaan negara. Pasang surut populisme Islam kanan atau politik identitas Islam kanan terjadi mulai orde Lama, orde Baru, hingga era reformasi. Di era reformasi, populisme Islam kanan menemukan momentumnya setelah belajar dari pengalaman populisme Eropa (Brexit, di Inggris) dan naiknya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat 2016. Spirit Brexit dan Trump dieskpresikan oleh populisme Islam kanan dalam rangkaian politik elektoral di Indonesia mulai dari pilpres 2014, pilkada DKI Jakarta 2017, hingga pilpres 2019. Ekspresi dari populisme Islam kanan terlihat dalam serangkaian “Aksi Bela Islam” 411 maupun 212 yang pada akhirnya, selain berhasil memenjarakan Ahok juga mengantarkan pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur DKI Jakarta. Spirit ini dimobilisasi kembali dalam pilpres 2019. Puncak dari kontestasi antara populisme Islam kanan dan populisme Islam tengah terjadi pada pilpres 2019. Jokowi sebagai petahana akhirnya memilih Makruf Amin sebagai Cawapres. Pilihan Jokowi atas Makruf Amin menandai kontestasi dua populisme Islam ini. Belajar dari pengalaman pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakarta, Jokowi selalu mendapat serangan kampanye hitam berbasis isu SARA. Dipilihnya Makruf Amin, selain melindungi Jokowi dari serangan kampanye hitam, juga dapat dilihat sebagai kontestasi antara populisme Islam kanan versus populisme Islam tengah dalam politik elektoral 2019. Akhirnya, terpilihnya pasangan Jokowi-Makruf untuk sementara menandai kemenangan populisme Islam tengah atas populisme Islam kanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini sesungguhnya bagian dari hasil riset dengan biaya mandiri yang penulis dan istri lakukan. Hasil keseluruhan riset telah kami terbitkan dalam bentuk buku. Artikel ini adalah bagian dari tema spesifik yang disendirikan untuk menjadi artikel jurnal. Untuk ini kami merasa berterima kasih kepada LP2M IAIN Manado yang sebelumnya mendiskusikan artikel ini.

REFERENCES

- Akmaliah, W. (2019). Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral. *MAARIF*, 14(1), 129–149.
- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, 2(2).
- Assyaukani, L. (2009). *Islam and the Secular State in Indonesia*. ISEAS.
- Bubalo, A., & Fealy, G. (2005). *Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia*. New Society Publishers.

- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for right-wing politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583.
- Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019. (2020). KPU. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>
- ICG. (2020). *Indonesia: Bagaimana Jaringan Jama'ah Islamiyah Beroperasi?*
- Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). *Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash*. Social Science Research Network.
- Iqbal, M. M. (2019). Nahdlatul Ulama Dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokritik Orientasi NU Dalam Politik Perspektif Insider. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(2), 181–187.
- Jati, W. R. (2017). Dari Umat Menuju Ummah: Melacak Akar Populisme Kelas Menengah Muslim Indonesia. *Maarif: Jurnal Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 12(1), 22–36.
- Kassim, Y. R. (2020). *Ma'ruf Amin Kampanyekan "Islam Jalan Tengah" bagi Indonesia dan Asia Tenggara*. Matamata Politik.
- Kauffman, L. A. (2001). The anti-politics of identity. *Identity Politics in the Women's Movement*, 20(1), 23–34.
- Khair, F. K. (2020). Wajah Agama di hadapan Politik Identitas: Refleksi Kritis Sejarah DI/TII di Sulawesi Tenggara. *Al-Qalam*, 25(3), 525–538.
- Khamdan, M., & Wiharyani, W. (2018). Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 193–218.
- Liddle, R. W. (1993). Skripturalisme Media Dakwah: Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru. *Ulumul Qur'an*, 3(4).
- Maarif, S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia. In *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Demokrasi Project.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. *Government and Opposition*, 39(4), 541–563.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2013). Exclusionary vs inclusionary populism: Comparing contemporary Europe and Latin America. *Government and Opposition*, 48(2), 147–174.
- Mudzakir, A. (2016). Islam dan politik di era kontemporer. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 31–48.
- Nasrudin, J. (2018). Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47.
- Nurhadi, N. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah Dan Relevansinya Dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 107–129.
- Perdana, A. A. (2019). Populisme Kanan, Islam dan Konteks Indonesia. *Maarif*, 14(1), 29–42.
- PKS. (2008). *Memperjuangkan masyarakat madani: falsafah dasar perjuangan dan platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera*. Majelis Pertimbangan Pusat, Partai Keadilan Sejahtera.

- Rahmat, M. I. (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Erlangga.
- Rizqa, H., & Ramadhan, B. (2017). *Sejarah Lahirnya Hizbut Tahrir, dari Timur Tengah Hingga Indonesia*. [Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/opmp0b330/sejarah-lahirnya-hizbut-tahrir-dari-timur-tengah-hingga-indonesia-part1](https://republika.co.id/berita/opmp0b330/sejarah-lahirnya-hizbut-tahrir-dari-timur-tengah-hingga-indonesia-part1)
- Romli, L. (2019). Political Identity and challenges for democracy consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 78–98.
- Sawri, S. (2020). Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022: Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 14–27.
- Setiyawan, W. B. M., & Dahani, N. C. (2020). Model bank tanah pertanian untuk mewujudkan Indonesia berdaulat pangan. *QISTIE*, 13(1), 78–95. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3427>
- Sholikin, A. (2018). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III. *Madani*, 10(1), 256949.
- Sonny, S. (2019a). Nilai Strategis Kefigurasi KH. Ma'ruf Amin sebagai Pasangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Renaissance*, 4(2), 541–550.
- Sonny, S. (2019b). Peta Politik Identitas di Indonesia: Studi Terpilihnya KH. Ma'ruf Amin sebagai Bakal Cawapres Capres Inkumben Joko Widodo pada Pilpres 2019. *Jurnal Renaissance*, 4(1), 443–455.
- Umar, A., & Kahar, S. (2019). Pengaruh Politik Identitas Pada Pemilihan Presiden 2019 (Survey Terhadap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara). *Ejournal KAWASA*, 9(2), 11–18.
- Vega, M. A. (2005). Amy Gutmann: Identity in Democracy. Princeton University Press, Princeton, 2003. *Foro Interno. Anuario de Teoría Política*, 5.
- Wahid, M. A. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1).
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.